

KAJIAN POTENSI SEKTOR EKONOMI KABUPATEN SEMARANG 2023



KAJIAN POTENSI SEKTOR EKONOMI KABUPATEN SEMARANG 2023

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan diberikannya otonomi penuh kepada daerah membawa konsekuensi pada tersedianya data statistik ekonomi Kabupaten Semarang sebagai bahan perencanaan pembangunan, khususnya bidang ekonomi sekaligus untuk mengevaluasi di tahun berikutnya. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang menerbitkan publikasi Buku Kajian Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Semarang 2023 sehingga perkembangan perekonomian Kabupaten Semarang dapat terus terpantau. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan baik berupa data, saran, kritikan serta bantuan dalam bentuk apapun.

Ungaran, Juni 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Semarang



PETRUS TRIYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720423 199203 1 005

ABSTRAK

Maksud dari disusunnya buku Kajian Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Semarang ini adalah untuk menyediakan referensi yang berisi data dan informasi dasar yang dapat merepresentasikan kondisi pembangunan ekonomi Kabupaten Semarang yang terukur berdasarkan indikator-indikator makro ekonomi. Analisis yang digunakan untuk melakukan tinjauan ekonomi dalam buku ini adalah analisis kuantitatif, dimana kondisi ekonomi Kabupaten Semarang disajikan dalam berbagai macam perhitungan angka maupun tampilan secara grafis. Sedangkan untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Semarang digunakan analisis LQ, Shift-Share, dan typology klassen. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Semarang di tahun 2023 kemarin mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sektor unggulan di Kabupaten Semarang tahun 2023 adalah Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.Manfaat.....	8
1.4.Ruang Lingkup.....	8
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	9
2.1.Konsep Indikator Ekonomi Makro.....	9
2.1.1.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..	9
2.1.2.Inflasi.....	14
2.1.3.Ketenagakerjaan.....	15
2.1.4.Kemiskinan	16
2.1.5.Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	16
2.1.6.Ketimpangan.....	17
2.2.Teori Ekonomi	18
2.2.1.Perekonomian Dua Sektor	21
2.2.2.Perekonomian Tiga Sektor.....	23
2.2.3.Perekonomian Empat Sektor.....	24

BAB III METODE PENGKAJIAN	27
3.1.Jenis dan Sumber Data.....	27
3.2.Analisis Makro Ekonomi.....	27
3.3.Analisis Deskriptif.....	27
3.4.Analisis Location-Quotient (LQ).....	28
3.5.Analisis Shift-Share	29
3.6.Analisis Typologi Klassen	30
BAB IV ANALISIS INDIKATOR EKONOMI MAKRO KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018-2022.....	32
4.1. Gambaran Umum Ekonomi Makro Kabupaten Semarang tahun 2018-2023.....	32
4.1.1.Produk Domestik Regional Bruto.....	32
4.1.2.Laju Pertumbuhan Penduduk.....	36
4.1.3.Produk Domestik Regional Bruto Perkapita	37
4.1.4.Inflasi.....	38
4.1.5.Ketenagakerjaan	39
4.1.6.Kemiskinan.....	41
4.1.7.Indeks Pembangunan Manusia	46
4.1.8.Ketimpangan.....	52
4.2.Posisi Ekonomi Kabupaten Semarang pada Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.....	53
4.2.1.Produk Domestik Regional Bruto	53
4.2.2.Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	56

4.2.3. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita	57
4.2.4. Inflasi	57
4.2.5. Ketenagakerjaan	58
4.2.6. Kemiskinan	60
4.2.7. Indeks Pembangunan Manusia	64
4.3. Hasil Potensi Sektor Unggulan	68
BAB V KESIMPULAN DAN Rekomendasi	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Rekomendasi	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1.1	Peranan PDRB Kabupaten Semarang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022.....	36
Tabel 4.2.1.1	Peranan PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022.....	57
Tabel 4.3.1	Hasil Perhitungan Analisis LQ Kabupaten Semarang dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	72
Tabel 4.3.2	Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share Kabupaten Semarang dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	73
Tabel 4.3.3	Hasil Perhitungan Analisis Klassen Typologi Kabupaten Semarang dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Siklus Perekonomian Dua Sektor.....	21
Gambar 2.2	Siklus Perekonomian Dua Sektor.....	23
Gambar 2.3	Siklus Perekonomian Tiga Sektor.....	24
Gambar 2.4	Siklus Perekonomian Empat Sektor.....	26
Gambar 4.1.1.1	PDRB Kabupaten Semarang ADHB dan ADHK Tahun 2018-2022.....	34
Gambar 4.1.2.1	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Semarang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022.....	38
Gambar 4.1.3.1	PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 Kabupaten Semarang.....	39
Gambar 4.1.4.1	Inflasi Tahunan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	40
Gambar 4.1.5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	41
Gambar 4.1.5.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	42

Gambar 4.1.6.1	Garis Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	43
Gambar 4.1.6.2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	44
Gambar 4.1.6.3	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	45
Gambar 4.1.6.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	47
Gambar 4.1.7.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	48
Gambar 4.1.7.2	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	49
Gambar 4.1.7.3	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	50
Gambar 4.1.7.4	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	51
Gambar 4.1.7.5	Pengeluaran perkapita Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	52
Gambar 4.1.8.1	Indeks Williamson Mengukur	54

	Ketimpangan di Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	
Gambar 4.2.1.1	PDRB ADHB dan ADHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	56
Gambar 4.2.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	59
Gambar 4.2.3.1	PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	60
Gambar 4.2.4.1	Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	61
Gambar 4.2.5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2022.....	62
Gambar 4.2.5.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2022.....	63
Gambar 4.2.6.1	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	64
Gambar 4.2.6.2	Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	65

Gambar 4.2.6.3	Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	66
Gambar 4.2.6.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022.....	67
Gambar 4.2.7.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	68
Gambar 4.2.7.2	Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	69
Gambar 4.2.7.3	Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	70
Gambar 4.2.7.4	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	70
Gambar 4.2.7.5	Pengeluaran Perkapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022....	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi 1100 14' 54,74 "-1100 39' 3"Bujur Timur dan 70 3' 57" 70 30'0' Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 hektare atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Ibu kota Kabupaten Semarang terletak di kota Ungaran. Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. Batas-batas Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal. Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar pada 500–2000m diatas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa Batur Kecamatan Getasan.

Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan adalah 104. Kondisi tersebut

terutama dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai diantaranya: Gunung Ungaran, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa dan Sumowono. Gunung Telomoyo, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Banyubiru, Getasan. Gunung Merbabu, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Getasan dan Tenganan. Pegunungan Sewakul terletak di wilayah Kecamatan Ungaran. Pegunungan Kalong terletak di wilayah Kecamatan Ungaran. Pegunungan Pasokan, Kredo, Tengis terletak di Wilayah Kecamatan Pabelan. Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng terletak di wilayah Kecamatan Suruh. Pegunungan Rong terletak di wilayah Kecamatan Tuntang. Pegunungan Sodong terletak di wilayah Kecamatan Tenganan. Pegunungan Pungkruk terletak di Kecamatan Bringin. Pegunungan Mergi terletak di wilayah Kecamatan Bergas.

Sungai atau kali dan danau atau rawa di Kabupaten Semarang diantaranya: kali garang, yang melalui sebagian wilayah Kecamatan Ungaran dan Bergas. Rawa Pening meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Jambu, Banyubiru, Ambarawa, Bawen, Tuntang dan Getasan. Kali Tuntang, yang melalui sebagian dari wilayah Kecamatan Bringin, Tuntang, Pringapus dan Bawen. Kali Senjoyo, melalui sebagian wilayah Kecamatan Tuntang, Pabelan, Bringin, Tenganan dan Getasan.

Kedadaan Topografi wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok,

yaitu; wilayah datar dengan tingkat kemiringan kisaran 0-2% seluas 6.169 hektare. Wilayah bergelombang dengan tingkat kemiringan kisaran 2-15% seluas 57.659 hektare. Wilayah curam dengan tingkat kemiringan kisaran 15-40% seluas 21.725 hektare. Wilayah sangat curam dengan tingkat kemiringan >40% seluas 9.467,674 hektare.

Secara Hidrologi, kekayaan sumber daya air yang tersedia di Kabupaten Semarang meliputi: sumber air dangkal atau mata air dengan kapasitas air sebesar 7.331,2 liter per detik, tersebar di 15 kecamatan. Sumber air permukaan atau sungai, dengan jumlah aliran sungai sebanyak 51 sungai, dengan panjang keseluruhan 350 Km dan memiliki debit total sebesar 2.668.480 liter per detik. Cekungan air, merupakan aquaifer dengan produktifitas air sedang dan tinggi. Cekungan-cekungan air tersebut banyak dimanfaatkan untuk obyek wisata kolamancing dan rumah makan. Waduk, satu-satunya waduk yang dimiliki Kabupaten Semarang adalah Waduk Rawa Pening yang memiliki volume air 65 juta m³ dengan luas genangan 2.770 hektare pada ketinggian muka air maksimal, sedangkan dengan ketinggian permukaan air minimal memiliki volume 25 juta m³ dengan luas genangan 1.760 hektare.

Distribusi ruas jalan antar wilayah di Kabupaten Semarang untuk jalan kabupaten relatif merata. Ruas jalan terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Susukan sebanyak 12 ruas dan terkecil terdapat di Kecamatan Bancak sebanyak 1 ruas.

Kesenjangan kondisi jaringan jalan lebih mencolok pada jenis jalan perkotaan. Sebanyak 144 ruas jalan perkotaan, hanya terdapat ditiga wilayah perkotaan yaitu Ungaran, Ambarawa, dan Bergas, dengan demikian wilayah perbatasan dan perdesaan memiliki akses jalan yang lebih sedikit.

Kuantitas dan kualitas saluran irigasi relatif sulit dipertahankan untuk mendorong produktifitas pertanian. Hal ini disebabkan selama kurun waktu lima tahun terakhir, kemampuan pemeliharaan rata-rata per meter saluran hanya mencapai Rp. 50.000, sementara nilai ideal untuk pemeliharaan sekitar Rp. 150.000 per meter. Selain kemampuan pemeliharaan, ancaman terhadap prasarana pengairan juga berasal dari peralihan fungsi lahan, dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Untuk mencegah kemerosotan kualitas prasarana pengairan, dilakukan upaya pemeliharaan berkala.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Semarang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari letak wilayah Kabupaten Semarang yang berada pada posisi strategis Yogyakarta Solo-Semarang (JOGLOSEMAR). Hal tersebut juga ditunjang dengan pertunjukkan seni tradisional yang sampai dengan saat ini terbina dengan baik eksistensinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerahnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 menetapkan visi pembangunan *Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI), Dengan Semangat Gotong Royong, Berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika.*

Maju berarti memiliki warga yang kreatif, dinamis dan berpikiran positif. Maju juga dimaknai dengan mempunyai kekuatan ekonomi yang tidak tertinggal dari daerah lain serta mampu berprestasi, berkompetisi dan unggul diberbagai bidang.

Bersatu bermakna bersama-sama saling menyatu tanpa memandang ciri ras, suku, agama dan lain-lain, agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Semarang yang BERDIKARI.

Berdaulat bermakna perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Berkepribadian bermakna masyarakat yang berkepribadian dan mampu menghormati dirinya sendiri dan masyarakat lainnya serta dapat berkomunikasi dan berdiplomasi dengan baik dengan masyarakat lainnya.

Sejahtera bermakna mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan

Manusia yang didukung dengan kebebasan kehidupan beragama dan bernegara.

Mandiri bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Dengan semangat gotong-royong, berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara

Dalam mewujudkan visinya, pemerintah daerah Kabupaten Semarang didukung oleh beberapa misinya. Diantara lain :

1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparaturnya yang kompeten dan profesional.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.
7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal.

Output pemerintahan yang paling utama adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dari segi sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkannya diperlukan suatu perencanaan yang matang sehingga kebijakan yang diterapkan dapat tepat sasaran.

Pengambilan kebijakan dalam pencapaian tujuan pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan, potensi wilayah, dan kondisi perekonomian daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan yang diharapkan maka implementasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Semarang harus didasarkan atas Indikator ekonomi. Oleh karena itu penyusunan Kajian Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Semarang memiliki peran dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.

Indikator-indikator ekonomi yang dimaksud berikutnya diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Semarang sekaligus memberikan arah bagi Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya di bidang perekonomian Jawa Tengah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya buku Kajian Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Semarang ini adalah untuk menyediakan referensi yang berisi data dan informasi dasar yang dapat merepresentasikan kondisi pembangunan ekonomi Kabupaten Semarang yang terukur berdasarkan indikator-indikator makro ekonomi. Selain itu, buku ini disusun dengan maksud menyajikan analisis terhadap capaian indikator ekonomi Kabupaten Semarang untuk rentang waktu 2018-2022. Secara khusus penulisan publikasi ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan perekonomian Kabupaten Semarang dan melihat kontribusinya terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari ditulisnya buku Kajian Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Semarang adalah :

1. Dapat mengetahui perkembangan perekonomian Kabupaten Semarang dan melihat kontribusinya terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
2. Dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang ekonomi.

1.4 Ruang Lingkup

Materi dalam buku Kajian Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Semarang ini merupakan indikator, beserta informasi dan analisisnya yang terkait dengan pembangunan ekonomi Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2018-2022.

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep Indikator Ekonomi

Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus membahas mekanisme bekerjanya perekonomian negara secara keseluruhan dan komprehensif. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kausal antara variabel-variabel aggregative.

Makro ekonomi digunakan untuk menganalisis target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran.

Pembahasan dalam buku ini meliputi indikator makro ekonomi diantaranya PDRB, tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Interaksi dalam masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut terjadi sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk, perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian besar masyarakat. Permintaan akan produk-produk ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akan lebih banyak dan lebih

bervariasi. Hal ini tentu akan direspon para produsen dengan meningkatkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas. Para produsen akan mengoptimalkan dan mengefisienkan sumber daya yang dimilikinya dalam memproduksi barang dan jasa dengan meningkatkan teknologi produksinya. Proses peningkatan produksi barang dan jasa inilah yang disebut sebagai proses pembangunan ekonomi.

Untuk mengukur seberapa besar kinerja perekonomian suatu wilayah di suatu negara maka dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) total nasional.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Ada beberapa jenis PDRB, diantaranya (Sumber. BPS KAB. SEMARANG) :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara.

Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

2. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

3. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar di atas, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi

yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga langsung berakibat menaikkan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang berakibat menaikkan harga tadi, ialah subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga. Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, hingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor.

PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas dan Air Bersih
- Konstruksi
- Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Pengangkutan dan Komunikasi
- Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak

tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- Pengeluaran konsumsi pemerintah
- Pembentukan modal tetap domestik bruto
- Perubahan inventori, dan
- Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

2.1.2 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga

diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi dapat terjadi oleh berbagai faktor seperti nilai tukar/kurs, volume uang beredar, bahkan dampak dari ekspektasi masyarakat. Dimensi lain yang terkena dampak negatif dari tingginya inflasi adalah meningkatnya nominal garis kemiskinan dan melemahnya purchasing power parity yang pada akhirnya akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi terbagi menjadi :

- 1. Inflasi ringan atau menyerap (Creeping Inflation)**
Merupakan inflasi yang lajunya rendah sekitar kurang dari 10% pertahun. Pada inflasi ini kenaikan harga relative lamban dan berlangsung lamban.
- 2. Inflasi sedang (Gallopig Inflation)**
Adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Lajunya berkisar 10% sampai 100%. Pada tingkat ini rate inflasi melebihi pertumbuhan produksi. Uang kehilangan kekuatannya.
- 3. Inflasi berat (High Inflation/Hyperinflation)**
Adalah inflasi yang tidak terkendali. Lajunya diatas 100% setahun.

2.1.3 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat disuatu daerah

maupun disuatu negara. Konsep ketenagakerjaan menyangkut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka TPT yang semakin rendah menunjukkan daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja yang semakin baik.

2.1.4 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan kita bisa menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Pilihan yang terpenting manusia adalah untuk berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks

pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Yang termasuk dasar kualitas hidup adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

2.1.6 Ketimpangan

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketimpangan regional. Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertical dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (disparity). Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah. Pada analisis kali ini untuk menghitung ketimpangan regional digunakan indeks ketimpangan Williamson.

Analisis Indeks Williamson merupakan analisis yang digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan perkapita pada waktu tertentu di suatu daerah karena perbedaan tingkat infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia di daerah. Adapun indikator untuk melihat ketimpangan di suatu daerah yaitu :

- a. Ketika nilai Indeks Willianson mendekati 1 maka daerah tersebut memiliki ketimpangan yg tinggi dan
- b. Apabila indeks williansom semakin mendekati 0 maka tingkat ketimpangan di daerah tersebut semakin kecil / pendapatannya merata.

Rumus:

$$W = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y)^2 \frac{n_i}{n}}{Y}}$$

Keterangan:

W : Indeks Williamson

n_i : Jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota

n : Jumlah penduduk di provinsi

Y_i : PDRB di wilayah kabupaten/kota (perkapita)

Y : PDRB di provinsi (perkapita)

2.2 Teori Ekonomi

Aktivitas yang terjadi dalam masyarakat secara umum didasarkan pada dua motivasi pokok yaitu motif ekonomi dan motif non ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Motif non-ekonomi adalah alasan yang melandasi tindakan seseorang bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan-keinginannya yang tidak terbatas. Kedua motif tersebut akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada arus ekonomi. Interaksi maupun transaksi yang terjadi dalam masyarakat terutama yang dilakukan pelaku ekonomi

baik berbentuk tindakan produksi, konsumsi maupun akumulasi (investasi) akan membentuk suatu proses ekonomi yang panjang dan berkaitan.

Interaksi dalam masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut terjadi sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk, perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian besar masyarakat. Permintaan akan produk-produk ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akan lebih banyak dan lebih bervariasi. Hal ini tentu akan direspon para produsen dengan meningkatkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas. Para produsen akan mengoptimalkan dan mengefisienkan sumber daya yang dimilikinya dalam memproduksi barang dan jasa dengan meningkatkan teknologi produksinya. Proses peningkatan produksi barang dan jasa inilah yang disebut sebagai proses pembangunan ekonomi.

Menurut Sadono Sukirno pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Menurut P. Todaro Pembangunan merupakan suatu proses multi-dimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan lembaga

rasional percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Sedangkan menurut Schumpeter Ekonomi pembangunan adalah perubahan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional yang terjadi secara spontan dan tidak terputus. Perubahan tersebut disebabkan karena dua hal, yaitu perubahan lapangan industri dan juga perdagangan. Pendapatan perkapita merupakan perhitungan berdasarkan rata-rata penghasilan penduduk suatu daerah, sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai dari produksi barang ataupun jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun.

Konsep ekonomi klasik secara sederhana menjelaskan bahwa transaksi ekonomi (makro) yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dibedakan menjadi dua kelompok pelaku utama yaitu produsen dan konsumen. Kelompok produsen menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok konsumen bagi kepentingan proses produksinya dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai produk barang dan jasa, atau lazimnya disebut sebagai output. Di sisi lain kelompok konsumen memiliki atau menguasai faktor-faktor produksi berupa tanah (land), tenaga kerja (labor), modal (capital) dan kewiraswastaan (entrepreneurship) yang digunakan oleh produsen sebagai input untuk mendukung kegiatan proses produksinya. Sebagai kompensasinya, konsumen akan menerima balas jasa dari produsen berupa sewa

tanah, upah dan gaji, bunga modal, dividen serta bentuk keuntungan lainnya. Balas jasa yang diterima oleh konsumen ini merupakan sumber pendapatan masyarakat, yang selanjutnya akan digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya.

Pada sisi yang berbeda, barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen tadi akan dibeli kembali oleh konsumen untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara penyediaan produk di satu sisi serta penggunaan (permintaan) di sisi lainnya ini disebut sebagai titik keseimbangan umum (general equilibrium).

2.2.1 Perekonomian Dua Sektor

Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana, karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi (masyarakat) dan rumah tangga produksi (perusahaan). Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1 Siklus Perekonomian Dua Sektor



Dari gambar 2.1, terlihat bahwa rumah tangga konsumen (RTK) adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa. Sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Interaksi

ekonomi dalam perekonomian dua sektor juga dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Gambar 2.2 Perekonomian Dua Sektor



Gambar 2.2 menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima RTK digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan.

2.2.2 Perekonomian Tiga Sektor

Perekonomian tiga sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran

pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Perekonomian tiga sektor dapat dijelaskan melalui gambar berikut.

Gambar 2.3 Perekonomian Tiga Sektor



Anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa.

Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2.2.3 Perekonomian Empat Sektor

Model perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibanding ekspornya. Sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya.

Dalam perekonomian empat sektor kita akan melihat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan (rumah tangga

produksi), dan pemerintah. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Mereka saling berinteraksi, sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri.

Gambar 2.4 Perekonomian Empat Sektor



Dari gambar 2.4 kita dapat melihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat dua macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing (devisa).

Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional akan saling berkaitan dan saling memengaruhi sehingga akan membentuk satu kesatuan dan sistem. Kemacetan dalam salah satu sektor dapat segera menjalar ke arus uang dan barang. Tugas menjaga kestabilan arus uang dan barang memang tidak mudah. Dalam ilmu ekonomi, arus perputaran uang dan barang/jasa digambarkan dalam suatu lingkaran kegiatan ekonomi seperti yang telah diuraikan di atas. Nah, lingkaran arus kegiatan ekonomi akan memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional.

BAB III METODE PENGAJIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam buku Kajian Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Semarang adalah data sekunder yang didapatkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Semarang.

3.2 Analisis Makro Ekonomi

Analisis yang digunakan untuk melakukan tinjauan ekonomi dalam buku ini adalah analisis kuantitatif, dimana kondisi ekonomi Kabupaten Semarang disajikan dalam berbagai macam perhitungan angka maupun tampilan secara grafis. Beberapa media analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran atau deskripsi dari data yang dikumpulkan tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian. Penyajian data dalam analisis deskriptif bisa dalam bentuk grafik atau gambar, presentasi, frekuensi, diagram, dan tabel.

Pada analisis ini kami menggunakan grafik dan tabel sebagai sarana penyajian data dalam analisis deskriptifnya. Grafik berperan untuk menunjukkan hubungan variabel-variabel ekonomi secara visual.

Menurut KBBI, grafik adalah pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar (tentang turun naiknya hasil, statistik, dan sebagainya). Dalam analisis ini, grafik digunakan untuk menjelaskan hubungan antar indikator makro ekonomi yang secara teoritis memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Tabel adalah model penyajian yang disusun dalam baris dan kolom. Tabel berupa kumpulan angka-angka berdasarkan kategori tertentu.

3.4 Analisis Location Quotient (LQ)

Metodologi LQ ini digunakan untuk mengetahui sektor basis dan sektor non-basis dengan membandingkan Persentase sumbangan masing-masing sektor dalam PDRB. Analisis Location Quotient digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya peranan kategori perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan kategori yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan pada suatu wilayah. Selain itu, analisis ini juga dipergunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (comparative advantage) suatu wilayah.

Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

- a. kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industry basic. Nilai LQ lebih besar dari satu.

b. kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut, jenis ini dinamakan industry non basic atau industri lokal. Nilai LQ kurang dari satu.

$$\text{Koefisien LQ} = \frac{y_i / y_t}{Y_i / Y_n}$$

di mana:

- a. y_i = pendapatan sektor ekonomi kabupaten
- b. y_t = pendapatan daerah kabupaten
- c. Y_i = pendapatan sektor ekonomi propinsi
- d. Y_t = pendapatan daerah propinsi.

3.5 Analisis Shift-Share

Shift Share merupakan salah satu teknik kuantitatif untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi. Dalam analisis Shift Share terdapat tiga macam rasio pertumbuhan, yaitu :

- **Regional Share (RS)** merupakan komponen share pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal. RS dapat mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah akibat kondisi perekonomian global yang terjadi.

- **Proportional Shift (PS)** komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut yang baik, dengan berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat.
- **Differential Shift (DS)** merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.
- **Shift Share (SS)** merupakan penjumlahan dari Regional Share dengan Proportional Share dan Differential Share.

Analisis ini menggunakan indikator :

- a. Bila komponen pertumbuhan proporsional (Mij) suatu sektor lebih besar dari nol, maka sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat dan memberikan pengaruh positif kepada perekonomian wilayah, begitu sebaliknya.
- b. Bila komponen daya saing (Cij) suatu sektor lebih besar dari nol, maka keunggulan komparatif dari sektor tersebut meningkat dalam perekonomian wilayah yang lebih luas, begitu pula sebaliknya.

3.6 Analisis Typologi Klassen

Typologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi

daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah (atau nasional) yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional).

Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral (yang dapat diperluas tidak hanya di tingkat sektor tetapi juga subsektor, usaha ataupun komoditi) menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

- a. Daerah maju dan cepat tumbuh (rapid growth region)
- b. Daerah maju tapi tertekan (retarded growth)
- c. Daerah berkembang cepat (growing region)
- d. Daerah relative tertinggal (relatively backward region)

BAB IV KAJIAN POTENSI SEKTOR EKONOMI KABUPATEN SEMARANGTAHUN 2018-2022

4.1 Gambaran Umum Ekonomi Makro Kabupaten Semarang

4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Untuk mengukur seberapa besar kinerja perekonomian suatu wilayah di suatu negara maka dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) total nasional. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

Gambar 4.1.1.1 PDRB Kab. Semarang ADHB dan ADHK Tahun 2018-2022 (Triliun)



Sumber : BPS Kab. Semarang

Perkembangan ekonomi Kabupaten Semarang selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022, menunjukkan perkembangan yang baik dan mengalami peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Namun, perekonomian Kabupaten Semarang mulai pulih kembali dengan ditandainya peningkatan PDRB ditahun 2021-2022. Berdasarkan gambar 4.1.1.1 kita bisa melihat tahun 2018 PDRB menurut ADHK Kabupaten Semarang sebesar 33,82 triliun terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 35,64 triliun. Ditahun 2020 menurun menjadi sebesar 34,69 triliun. Kemudian mengalami peningkatan kembali ditahun 2021 dan 2022 menjadi sebesar 35,95 triliun dan 37,86 triliun. PDRB menurut

atas dasar harga berlaku juga mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai 2019. Tahun 2018 PDRB Kabupaten Semarang berdasar atas dasar harga berlaku sebesar 46,19 triliun, tahun 2019 sebesar 49,64 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Semarang mengalami penurunan menjadi sebesar 49,03 triliun, hal ini dikarenakan oleh pandemi Covid-19 yang membuat semua sektor perekonomian tidak bisa maksimal dalam menghasilkan output. Namun, mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 hingga 2022 menjadi sebesar 51,81 triliun dan 56,63 triliun.

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam Persentase, menunjukkan besarnya peranan atau kontribusi masing-masing kategori ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan mencerminkan peringkat nilai tambah kategori tersebut. Sehingga untuk melihat kekuatan setiap kategori dalam pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori tersebut. Dengan memperhatikan peranan kategori ekonomi maka dapat ditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Sumbangan terbesar pada tahun 2022 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan (37,49%), kemudian diikuti kategori Konstruksi (13,11%), kategori Perdagangan Besar dan Eceran (11,68%), dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (9,84%). Sementara peranan kategori yang lainnya di bawah 6%.

Sektor yang memiliki kontribusi paling kecil pada PDRB Kabupaten Semarang adalah sektor pengadaan air,

pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 0,06 sampai 0,08% terhadap PDRB Kabupaten Semarang.

Tabel 4.1.1.1 Peranan PDRB Kabupaten Semarang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (%)

Kategori (1)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.20	10.85	11.19	10.15	9.84
B	Pertambangan dan Penggalian	0.27	0.27	0.27	0.23	0.21
C	Industri Pengolahan	39.05	39.34	39.03	37.68	37.49
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08
F	Konstruksi	13.99	13.76	13.57	13.46	13.11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.87	10.94	10.62	11.71	11.68
H	Transportasi dan Pergudangan	1.98	2.04	1.65	1.91	2.99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.05	3.11	2.95	3.17	3.41
J	Informasi dan Komunikasi	3.42	3.54	4.17	5.89	5.70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.53	3.46	3.55	3.43	3.28
L	Real Estat	3.06	3.04	3.05	3.32	3.30
M,N	Jasa Perusahaan	0.54	0.56	0.55	0.51	0.51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.72	2.63	2.66	2.51	2.52
P	Jasa Pendidikan	4.17	4.27	4.43	3.64	3.50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.74	0.75	0.84	0.82	0.79

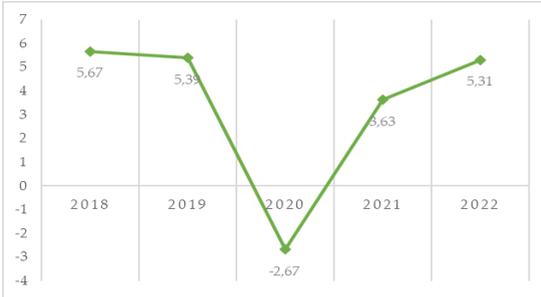
R.S. T.U	Jasa lainnya	1.24	1.27	1.29	1.36	1.47
Produk DomestikRegional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kab. Semarang

4.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil), karena hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu sebab pengaruh perubahan harga telah diiadakan.

Gambar 4.1.2.1 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Semarang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (%)



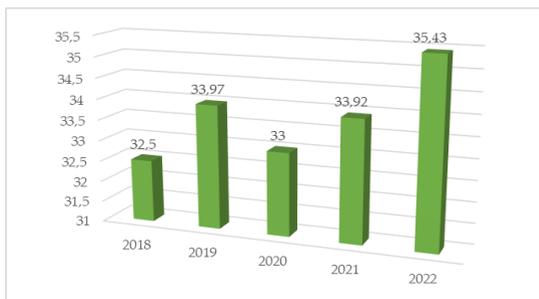
Sumber : BPS Kab. Semarang

Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang dapat dikatakan stabil dinilai sekitar 5% pada setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Meskipun seperti tampak pada gambar 4.1.2.1 pertumbuhannya terlihat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tertinggi mencapai 5,67% pada tahun 2018. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang menjadi terkontraksi di angka -2,67%. Pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 – 2022 berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,63% dan tahun 2022 sebesar 5,31%.

4.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu data yang dapat menggambarkan tingkat rata-rata kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berikut adalah gambaran angka PDRB per kapita tahun 2018-2022 di Kabupaten Semarang.

Gambar 4.1.3.1 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 di Kabupaten Semarang (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kab. Semarang

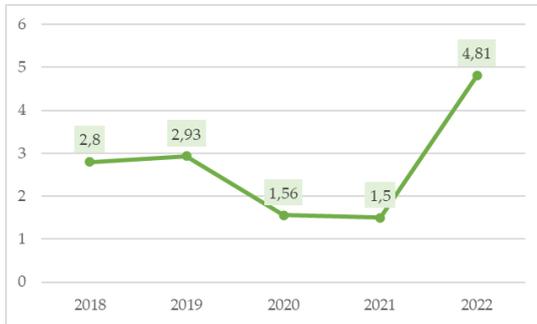
PDRB per kapita Kabupaten Semarang tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 menurun akibat imbas dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Semarang sebesar 33 juta rupiah menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang besarnya 33,97 juta rupiah. Namun, pada tahun 2021 - 2022 mengalami pemulihan

masing-masing sebesar 33,92 juta rupiah dan 35,43 juta rupiah, tahun 2022 merupakan PDRB per kapita tertinggi selama 5 tahun terakhir.

4.1.4 Inflasi

Inflasi di Kabupaten Semarang selama tahun 2018 sampai 2022 berfluktuasi (Gambar 4.1.4.1). Pada tahun 2018-2019 meningkat sebesar 0,13%. Pada tahun 2020 dan 2021 inflasi turun cukup tajam menjadi sebesar 1,56% dan 1,5%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pandemi covid-19 yang menyebabkan daya beli konsumen menurun. Inflasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan mencapai 4,81%.

Gambar 4.1.4.1 Inflasi Tahunan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022 (%)

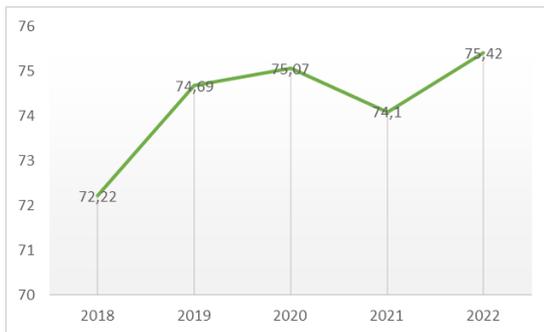


Sumber : BPS Kab. Semarang

4.1.5 Ketenagakerjaan

Bisa kita lihat pada gambar 4.1.5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Semarang pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 TPAK Kabupaten Semarang sebesar 74,69% dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 75,07% kemudian mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 74,1%, dan meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 75,42%. Rata-rata TPAK selama tahun 2018-2022 di Kabupaten Semarang adalah 74,3%. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Semarang terdapat sekitar 74 orang yang termasuk kedalam angkatan kerja.

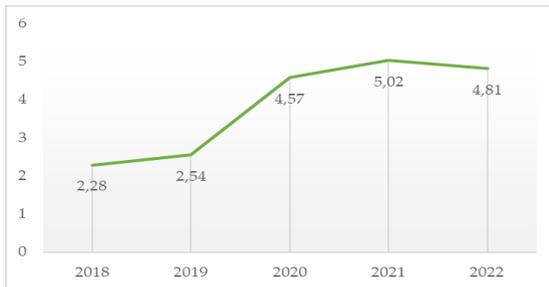
Gambar 4.1.5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber : BPS Kab. Semarang

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Ini terjadi karena jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang begitu tajam. Tahun 2019 TPT Kabupaten Semarang sebesar 2,54%. TPT pada tahun 2020 di Kabupaten Semarang mengalami kenaikan sebesar 2,03% menjadi 4,57%, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 5,02% sehingga menjadi TPT yang tertinggi selama lima tahun terakhir. TPT pada tahun 2022 sebesar 4,81% yang berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja sebanyak lima orang diantaranya termasuk pengangguran.

Gambar 4.1.5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022 (%)



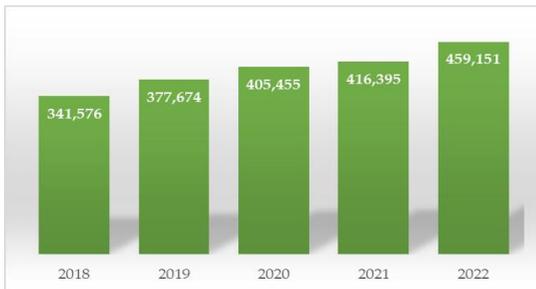
Sumber : BPS Kab. Semarang

4.1.6 Kemiskinan

Gambar dibawah ini menunjukkan perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir. Garis kemiskinan tahun 2022 adalah 459.151 rupiah per bulan. Angka ini menunjukkan bahwa seseorang di Kabupaten Semarang akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan nonmakanan setiap bulannya kurang dari 459.151 rupiah.

Garis kemiskinan Kabupaten Semarang dari tahun 2018 sampai tahun 2022 semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebesar 341.576 rupiah dan tahun 2019 sebesar 377.674 rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat signifikan sebesar 459.151 rupiah, .

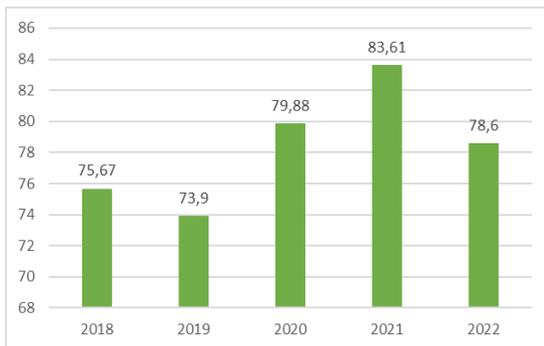
Gambar 4.1.6.1 Garis Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022 (Rupiah/Bulan)



Sumber : BPS Kab. Semarang

Seperti yang telah dijelaskan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Penduduk miskin di Kabupaten Semarang dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar yang disebabkan oleh imbas pandemi Covid-19. Dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 83,61 jiwa, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 78,6 jiwa

Gambar 4.1.6.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022 (jiwa)

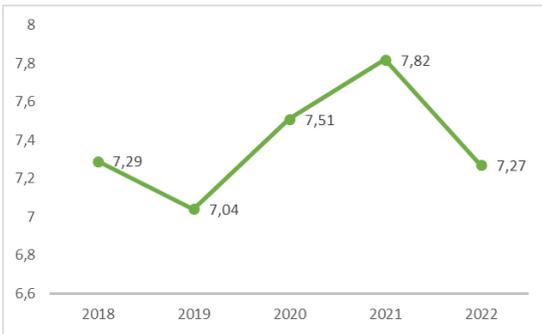


Sumber : BPS Kab. Semarang

Pola yang sama tentu juga terjadi pada persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang juga mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai 2019,

dan meningkat pada tahun 2020 dan 2021 seperti pada gambar 4.1.6.3 dibawah ini.

Gambar 4.1.6.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber : BPS Kab. Semarang

Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang sebesar 7.29%. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan menjadi 7,51% dan 7,82%. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,27%.

Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan digunakan untuk mengetahui jarak antara rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin terhadap garis

kemiskinan. Semakin besar nilai indeks P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Dengan demikian, semakin besar nilai P1 maka semakin besar pula upaya yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin dari keterpurukannya.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir sangat berfluktuasi seperti yang bisa kita lihat pada gambar 4.1.6.4 tingkat keterpurukkan penduduk miskin di Kabupaten Semarang yang ditunjukkan oleh indeks P1. Pada tahun 2018, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Semarang sebesar 1,51 namun menurun pada tahun 2019 sebesar 0,63 dan kembali meingkat pada tahun 2020 sebesar 0,96, serta tahun 2022 meningkat menjadi 1,03.

Sementara kondisi ketimpangan antara penduduk miskin di Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir juga mengalami fluktuasi seperti yang ditunjukkan oleh indeks P2 pada gambar 4.1.6.4. Namun pada tahun 2019-2022 tingkat kesenjangan antara penduduk miskin menunjukkan adanya peningkatan karena indeks P2 pada tahun 2019-2022 di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan P2.

Gambar 4.1.6.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022

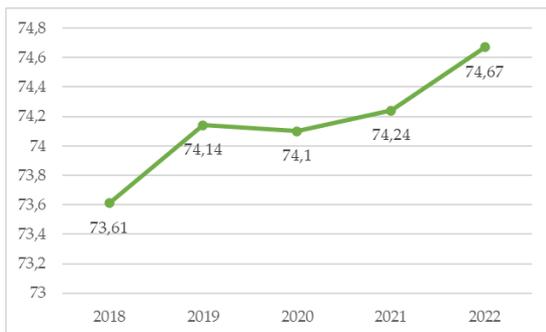


Sumber : BPS Kab. Semarang

4.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Dari gambar 4.1.7.1 kita bisa melihat bahwa IPM di Kabupaten Semarang dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Tahun 2018 IPM Kabupaten Semarang sebesar 73,61 mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 74,14, dan penurunan pada tahun 2020 sebesar 74,1. Kemudian pada tahun 2022 IPM Kabupaten Semarang meningkat lagi menjadi 74,67. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, IPM Kabupaten Semarang tahun 2022 merupakan nilai IPM tertinggi.

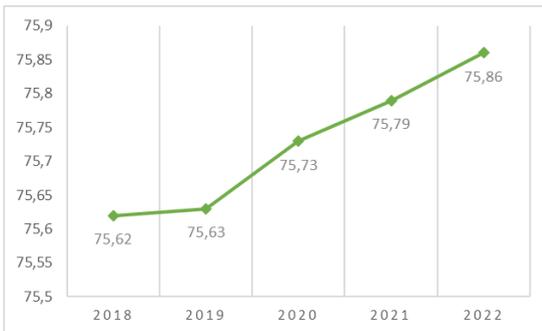
**Gambar 4.1.7.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kab. Semarang

Untuk mengukur kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

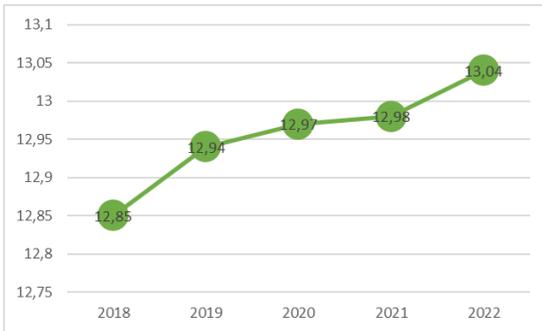
**Gambar 4.1.7.2 Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kab. Semarang

Angka harapan hidup di Kabupaten Semarang Tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2018 angka harapan hidup di Kabupaten Semarang adalah 75,62 ini artinya rata-rata lama hidup penduduk Kabupaten Semarang di tahun 2018 kurang lebih 76 tahun. Kenaikan signifikan angka harapan hidup terjadi tahun 2020-2022 sebesar 75,73; 75,79; 75,86. Untuk mengukur pendidikan digunakan indikator angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah.

Gambar 4.1.7.3 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022

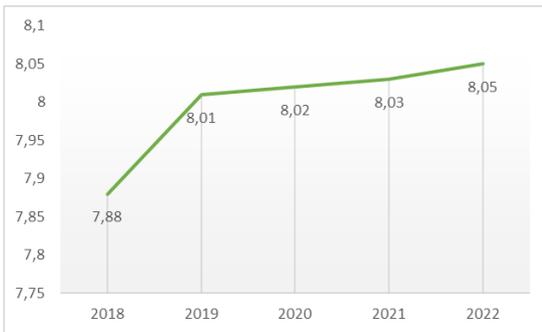


Sumber : BPS Kab. Semarang

Harapan lama sekolah Kabupaten Semarang pada tahun 2018 sebesar 12,85 meningkat di tahun 2019 menjadi 12,94 dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 menjadi sebesar 13,04.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Bila angka partisipasi sekolah di Kabupaten Semarang rendah maka kemungkinan besar angka rata-rata lama sekolahnya juga akan rendah.

Gambar 4.1.7.4 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022



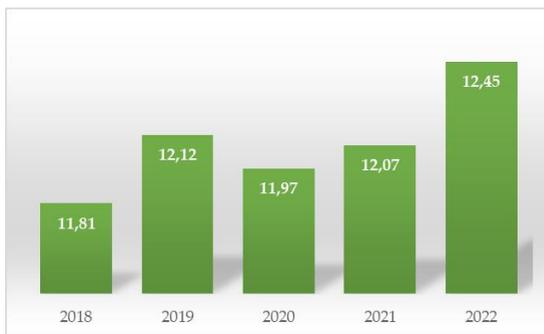
Sumber : BPS Kab. Semarang

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Semarang sebesar 7,88 kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 8,01 dan terus mengalami peningkatan ditahun 2022 sebesar 8,05.

Untuk mengukur kehidupan yang layak digunakan indikator pengeluaran per kapita. Indikator ini digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-

harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

Gambar 4.1.7.5 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022 (Juta)



Sumber : BPS Kab. Semarang

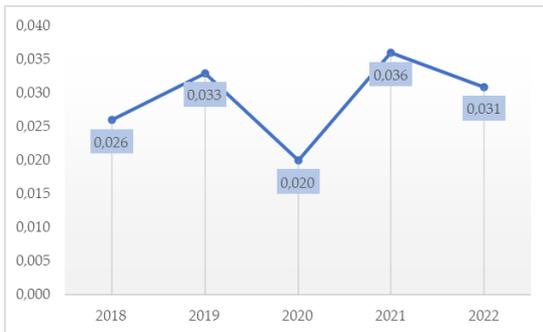
Pengeluaran perkapita Kabupaten Semarang tahun 2018 menjadi 11,81 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019 menjadi sebesar 12,12 juta pertahun. Kenaikan pengeluaran perkapita yang semakin meningkat dikarenakan semakin tingginya kebutuhan hidup. Kenaikan paritas daya beli ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk dengan adanya kenaikan pendapatan. Hal ini mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan untuk melanjutkan sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik. Namun, pada tahun

2020 menurun menjadi sekitar 11,97 juta rupiah. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat menurun sehingga daya beli juga menurun. Namun mengalami kenaikan kembali ditahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 12,07 juta rupiah dan 12,45 juta rupiah.

4.1.8 Ketimpangan

Ketimpangan yang ada di Kabupaten Semarang bisa dilihat dari gambar 4.1.8.1. Ketimpangan pendapatan perkapita di Kabupaten Semarang selama lima tahun belakangan berfluktuasi, terjadi peningkatan di tahun 2018-2019 dan 2020-2021. Pada tahun 2018 ketimpangan pendapatan perkapita di Kabupaten Semarang mencapai 0.026. Di tahun 2019 meningkat menjadi 0,033. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,020, dan terjadi peningkatan ketimpangan di Kabupaten Semarang menjadi 0,036 pada tahun 2021. Selanjutnya, di tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 0,031. Selama kurun lima tahun terakhir, ketimpangan tertinggi di Kabupaten Semarang terjadi pada tahun 2021.

Gambar 4.1.8.1 Indeks Williamson mengukur Ketimpangan di Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022



Sumber : Data diolah

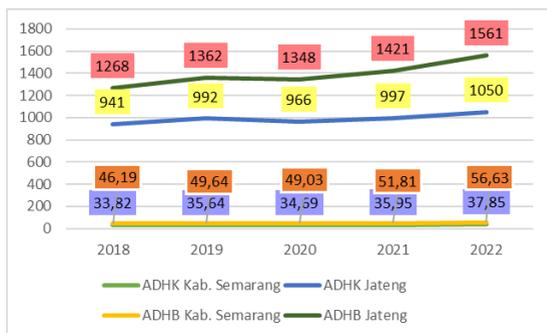
Berdasarkan hasil perhitungan nilai Williamson di atas rata-rata nilai Williamson di Kabupaten Semarang tiap tahunnya yaitu sebesar 0.028 dimana nilai tersebut semakin mendekati nilai 0 yang artinya ketimpangan/disparitas yang ada semakin rendah (merata). Oleh karena itu dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Semarang masih berada di level yang rendah. Meskipun demikian, ketimpangan di Kabupaten Semarang cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Semarang harus selalu berupaya menurunkan Indeks Williamson agar mencapai angka ideal melalui intervensi kebijakan spasial dan mendasarkan pada karakteristik khusus setiap wilayah.

4.2 Posisi Ekonomi Kabupaten Semarang pada Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

4.2.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah berdasar harga berlaku selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun 2018 PDRB menurut harga berlaku mencapai 1.268 triliun. Meningkat di tahun berikutnya yaitu tahun 2019 menjadi sebesar 1.362 triliun. Mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi sebesar 1.348 triliun. Penurunan ini diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan signifikan pada sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. PDRB menurut harga berlaku di Jawa Tengah meningkat kembali ditahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 1.421 triliun dan 1.561 triliun. Peningkatan ini terjadi karena sudah pulihnya sektor ekonomi di Jawa Tengah sehingga mampu meningkatkan PDRB Jawa Tengah.

Gambar 4.2.1.1 PDRB ADHB dan ADHK Provinsi Jawa Tengah dan Kab Semarang Tahun 2018-2022 (Triliun)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Sama halnya dengan Kabupaten Semarang, sumbangan terbesar PDRB di Provinsi Jawa Tengah adalah pada sektor industri pengolahan. Meskipun selama lima tahun terakhir ini sektor industri pengolahan mengalami penurunan distribusi terhadap PDRB. Tahun 2018 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 34,4% terhadap PDRB provinsi Jawa Tengah. Kemudian mengalami penurunan hingga empat tahun berikutnya.

Sektor yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2018 sampai 2022 adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Besarnya kontribusi

pada sektor ini di Provinsi Jawa Tengah sama dengan kontribusinya di Kabupaten Semarang yaitu sekitar 0.06%.

Tabel 4.2.1.1 Peranan PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (%)

Kategori (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.1	13.5	14.3	13.9	13.5
B Pertambangan dan Pengalihan	2.55	2.48	2.45	2.58	2.42
C Industri Pengolahan	34.4	34.4	34.5	34.3	33.9
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.1	0.09	0.10	0.10	0.09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
F Konstruksi	10.73	10.8	10.5	11.1	11.0
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.64	13.7	13.5	13.8	13.6
H Transportasi dan Pergudangan	3.12	3.22	2.21	2.26	3.80
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.11	3.21	2.99	3.06	3.39

J	Informasi dan Komunikasi	3.47	3.64	4.26	4.29	4.01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.96	2.89	2.98	3.02	3.01
L	Real Estate	1.69	1.68	1.71	1.67	1.63
M. N	Jasa Perusahaan	0.4	0.42	0.40	0.40	0.40
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.73	2.67	2.70	2.52	2.40
P	Jasa Pendidikan	4.5	4.62	4.74	4.55	4.23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.89	0.9	1.01	0.97	0.92
R.	Jasa lainnya	1.59	1.63	1.53	1.48	1.56
	Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

4.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah meningkat pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Namun, menurun pada tahun 2020 dan kembali meningkat tajam ditahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5.31% meningkat di tahun 2019 menjadi 5.41%. Kemudian pada tahun 2020 menurun drastic menjadi -2,65% dan meningkat kembali pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 3.32% dan 5.31% Tren yang sama juga terjadi di Kabupaten Semarang.

**Gambar 4.2.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK
Prov. Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun
2018-2022 (%)**

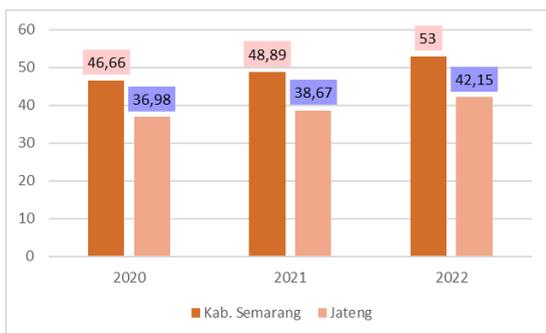


Sumber : BPS Kab. Semarang dan BPS Jawa Tengah

4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Tetapi, PDRB perkapita Kabupaten Semarang selalu lebih tinggi dibandingkan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar 4.2.3.1 Produk Domestik Regional Bruto
Perkapita Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten
Semarang tahun 2020-2022 (Juta Rupiah)**



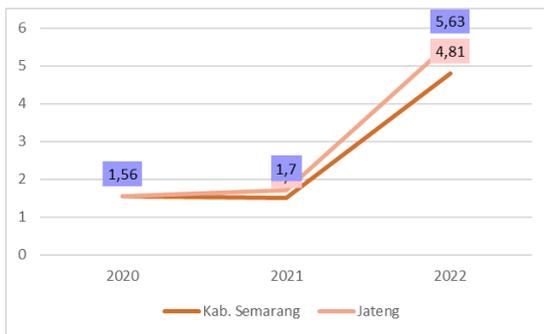
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

4.2.4 Inflasi

Inflasi di Provinsi Jawa Tengah berfluktuasi setiap tahunnya dan memiliki trend meningkat. Besarnya inflasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah 1,56 inflasi di tahun ini merupakan inflasi terendah dalam kurun waktu tiga tahun. Inflasi meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 1,7 dan meningkat drastis ditahun 2022 sebesar 5,63. Komoditas yang menjadi pemicu utama terjadinya inflasi Jawa Tengah antara lain kenaikan harga beras, telur ayam, emas perhiasan, minyak goreng, dan daging ayam. Sementara dari enam kota di Jawa Tengah seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal yang mencapai 0,61

persen. Adapun inflasi terendah terjadi di Kudus yang mencapai 0,40 persen.

Gambar 4.2.4.1 Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2022



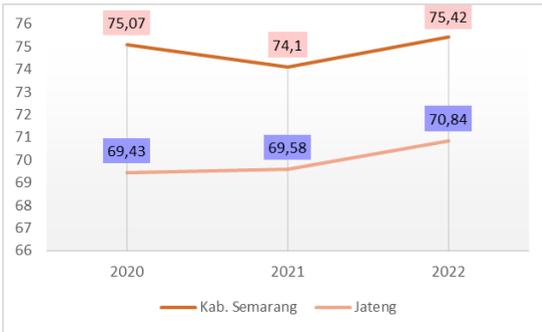
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Dikomentari [s1]: Mohon maaf apakah angka 17 bisa dinaikan ? karena menutupi angka dibawahnya.

4.2.5 Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah tidak berbeda dengan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Semarang jika dilihat pada grafiknya. Pada tahun 2020 TPAK di Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,43%. Pada tahun 2021 dan 2022 juga terjadi peningkatan sebesar 69,58% dan 70,84%. Namun, tingkat TPAK di Kabupaten Semarang lebih tinggi daripada di provinsi Jawa Tengah.

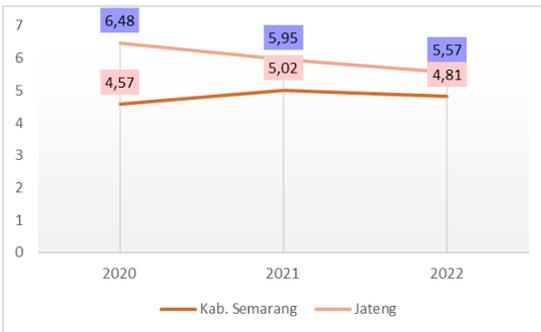
Gambar 4.2.5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2022 (%)



Sumber : BPS Kab. Semarang dan BPS Jawa Tengah

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan tiap tahunnya selama tiga tahun terakhir. Tahun 2020 TPT Jawa Tengah sebesar 6,48% menurun kembali di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 5,95% dan 5,57%.

Gambar 4.2.5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2022 (%)



Sumber : BPS Kab. Semarang dan BPS Jawa Tengah

4.2.6 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah 3.897 orang. Mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi sebanyak 3.743 orang. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar sebanyak 3.980 orang. Dan terus meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 4.109 orang dan mengalami penurunan kembali menjadi 3.832 orang.

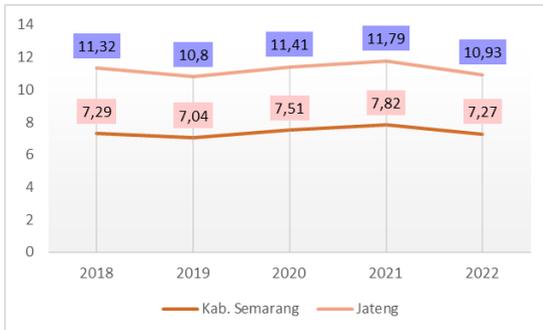
Gambar 4.2.6.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Orang)



Sumber : BPS Jawa Tengah

Jumlah penduduk miskin yang fluktuatif mengakibatkan persentase kemiskinan juga ikut fluktuatif. Persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 dan 2019 sebesar masing-masing 11.32% dan 10.8%. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 11.41% dan 11,79%. Mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 10,93%.

Gambar 4.2.6.2 Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber : BPS Kab. Semarang dan BPS Jawa Tengah

Garis kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 350.875 rupiah dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2022 menjadi sebesar 459.151 rupiah.

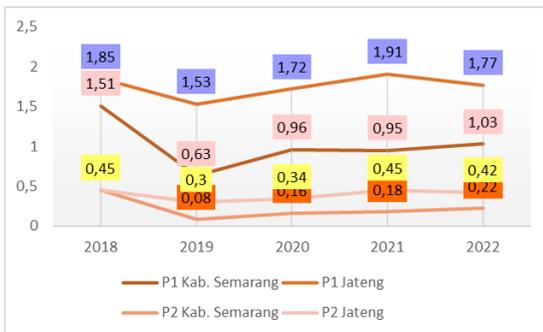
Gambar 4.2.6.3 Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022 (Rupiah)



Sumber : BPS Kab. Semarang dan BPS Jawa Tengah

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di provinsi Jawa Tengah juga mengalami penurunan tiap tahunnya selama kurun waktu empat tahun, namun pada tahun 2020 dan 2021 terus mengalami kenaikan. Hal ini bisa kita lihat pada gambar 4.2.6.4.

Gambar 4.2.6.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022



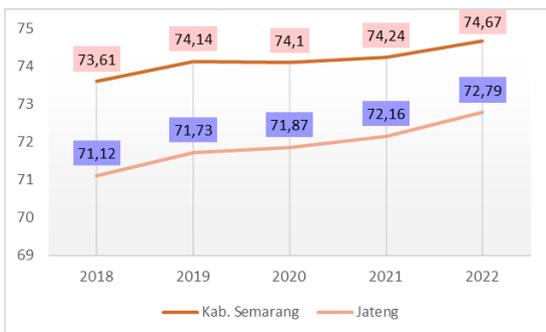
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Dikomentari [s2]: Apakah ini juga bisa dirapikan ? supaya angkanya terbaca

4.2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan selama tahun 2018 sampai tahun 2022. IPM terendah di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2018 sebesar 71,12 dan yang tertinggi berada pada tahun 2022 sebesar 72,79. Hal yang sama juga terjadi pada IPM Kabupaten Semarang yang mengalami kenaikan tiap tahunnya meskipun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Namun, IPM Kabupaten Semarang lebih besar dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah.

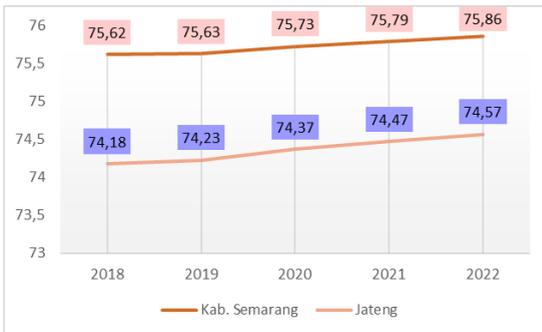
Gambar 4.2.7.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Semarang

Selain indeks pembangunan manusia yang kian meningkat tiap tahunnya, angka harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami kenaikan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.2.7.2 hal ini mengindikasikan bahwa kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya mengalami kenaikan secara kualitas. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Semarang.

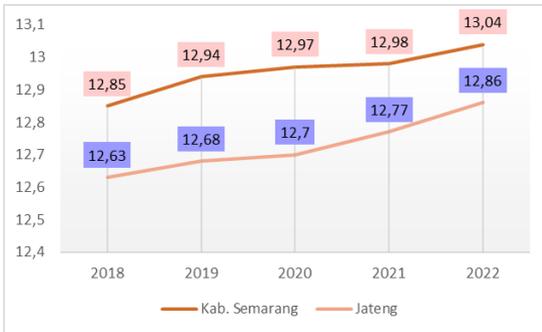
Gambar 4.2.7.2 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Semarang

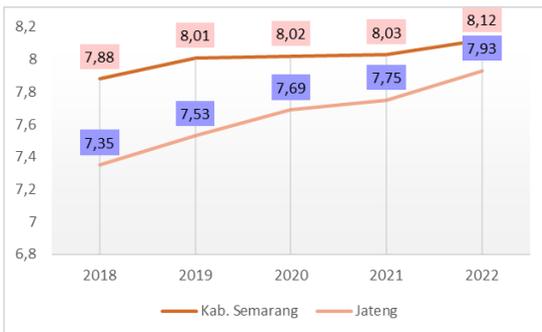
Dari segi pendidikan juga Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan yang ditunjukkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh gambar 4.2.7.3 dan gambar 4.2.7.4.

Gambar 4.2.7.3 Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4.2.7.4 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Pengeluaran perkapita Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sampai 2022 juga mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Semarang.

Gambar 4.2.7.5 Pengeluaran Perkapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Ribu)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

4.3 Hasil Potensi Sektor Unggulan

Adapun hasil olah analisis LQ dengan Kabupaten Semarang wilayah referensi Provinsi Jawa Tengah tersajikan dalam Tabel 4.3.1

Tabel 4.3.1 Hasil Penghitungan Analisis LQ Kabupaten Semarang dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

NO	SEKTOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,82	0,82	0,80	0,80	1,00
2	Pertambangan dan Penggalian	0,10	0,10	0,10	0,10	1,00
3	Industri Pengolahan	1,11	1,12	1,11	1,13	1,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,11	1,08	1,10	1,08	1,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,11	1,11	1,10	1,06	1,00
6	Konstruksi	1,32	1,28	1,30	1,26	1,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,81	0,80	0,79	0,79	1,00
8	Transportasi dan Pergudangan	0,67	0,67	0,78	0,78	1,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,98	0,97	0,98	0,97	1,00
10	Informasi dan	0,96	0,95	0,95	0,94	1,00

	Komunikasi					
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,25	1,25	1,25	1,24	1,00
12	Real Estate	1,75	1,75	1,73	1,73	1,00
13	Jasa Perusahaan	1,32	1,31	1,34	1,33	1,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,03	1,02	1,02	1,02	1,00
15	Jasa Pendidikan	0,91	0,91	0,91	0,93	1,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,85	0,86	0,86	1,00
17	Jasa lainnya	0,80	0,80	0,87	0,84	1,00

Sumber : data diolah

Adapun hasil olah analisis Shift-Share Kabupaten Semarang dengan wilayah referensi Provinsi Jawa Tengah tersajikan dalam Tabel 4.3.2

Tabel 4.3.2 Hasil Penghitungan Analisis Shift-Share Kabupaten Semarang dengan Wilayah Referensi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

NO	SEKTOR	KOMPONEN PERTUMBUHAN NASIONAL	KOMPONEN BAURAN INDUSTRI	KOMPONEN KEUNGGULAN KOMPETITIF	PDRB
		(Nij)	(Mij)	(Cij)	
(000 Orang)					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-341719062,4	-3410655,017	361631957,4	16502240

2	Pertambangan dan Pengalihan	-7273058,621	-275308,4939	8098541,115	550174
3	Industri Pengolahan	-1233551782	4916664,514	1362522392	13388725
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-3927676,242	21938,80196	4504135,44	598398
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2527176,481	14893,68819	2902390,793	390108
6	Konstruksi	-446248537	4744791,874	472776282,1	31272537
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-379234450,7	-3104299,087	429340073,7	47001324
8	Transportasi dan Pergudangan	-74310851,32	-386779,9623	110441431,3	35743800
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-103260559,6	202749,4663	124588454,2	21530644
10	Informasi dan Komunikasi	-150522531,7	1134021,79	208497595,9	59109086
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-110736994	951870,3186	118681888,7	8896765
12	Real Estate	-107457548	3345620,21	116927940,8	12816013
13	Jasa Perusahaan Administrasi	-16419112,91	220870,6081	18270240,31	2071998
14	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-85959607,9	-68665,83138	91716186,74	5687913
15	Jasa Pendidikan	-114403900,1	-443906,1761	128106977,3	13259171
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-24065810,9	-87580,37729	29157075,27	5003684
17	Jasa lainnya	-44108544,18	-243739,954	54055124,14	9702840
TOTAL		-3245727204	7532486,371	3255430044	17235326

Sumber : data diolah

Dengan kedua analisis tersebut, kita akan mampu melihat sektor ekonomi mana saja yang termasuk sektor unggulan, sektor potensial, dan sektor terbelakang di Kabupaten Semarang melalui analisis Klasen Typologi. Hasil analisisnya seperti tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3.3 Hasil Penghitungan Analisis Kelas
Typologi Kabupaten Semarang dengan Wilayah
Referensi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

	LQ >1	LQ <1
	(SEKTOR UNGGULAN)	(SEKTOR POTENSIAL)
SS (Cij +)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan 2. Pengadaan Listrik dan Gas 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4. Konstruksi 5. Jasa Keuangan dan Asuransi 6. Real Estate 7. Jasa Perusahaan 8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4. Transportasi dan Pergudangan 5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6. Informasi dan Komunikasi 7. Jasa Pendidikan 8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9. Jasa lainnya

Sumber : data diolah

Berdasarkan hasil analisis *Klassen Typologi*, yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Semarang adalah :

1. Industri Pengolahan
2. Pengadaan Listrik dan Gas
3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
4. Konstruksi
5. Jasa Keuangan dan Asuransi
6. Real Estate
7. Jasa Perusahaan
8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Adapun sektor potensial di Kabupaten Semarang, diantaranya:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4. Transportasi dan Pergudangan
5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
6. Informasi dan Komunikasi
7. Jasa Pendidikan
8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
9. Jasa lainnya

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari analisis data yang sudah dilakukan, maka kajian ini mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi Kabupaten Semarang selama kurun waktu empat tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang baik dan selalu mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 hampir semua indikator ekonomi di Kabupaten Semarang mengalami penurunan sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, pada tahun 2021 berbagai sektor perekonomian Kabupaten Semarang telah mengalami pemulihan sehingga perekonomian di Kabupaten Semarang meningkat.
2. Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Semarang tahun 2021 masih sama seperti tahun 2020 yang lebih dominan pada kategori Industri Pengolahan yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini

terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Semarang.

3. Sumbangan terbesar pada tahun 2022 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan (37,49%), kemudian diikuti kategori Konstruksi (13,11%), kategori Perdagangan Besar dan Eceran (11,68%), dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (9,84%). Sementara peranan kategori yang lainnya di bawah 6%.
4. Sektor yang memiliki kontribusi paling kecil pada PDRB Kabupaten Semarang adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 0,06 sampai 0,08% terhadap PDRB Kabupaten Semarang.
5. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang dapat dikatakan stabil dinilai sekitar 5% pada setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis. Adanya pandemic Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang menjadi negatif di angka -2,67%. Namun mengalami kenaikan kembali ditahun 2021-2022 menjadi sebesar 3,63% dan 5,31%.

6. PDRB per kapita Kabupaten Semarang mengalami penurunan ditahun 2020, namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 dan 2022.
7. Inflasi di Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami penurunan.
8. Rata-rata TPAK selama lima tahun terakhir (2018-2022) di Kabupaten Semarang adalah 74,3%. Ini berarti setiap diantara 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Semarang terdapat sekitar 74 orang yang termasuk kedalam angkatan kerja
9. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Semarang selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Ini terjadi karena jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang begitu tajam.
10. Garis kemiskinan Kabupaten Semarang dari tahun 2018 sampai tahun 2022 semakin meningkat tiap tahunnya.
11. Persentase penduduk miskin yang semula menurun kini meningkat kembali akibat pandemi Covid-19.
12. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir sangat berfluktuasi

13. Kondisi rata-rata ketimpangan antara penduduk miskin di Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir memiliki nilai 0,031 yang berarti ketimpangan di Kabupaten Semarang semakin rendah.
14. IPM di Kabupaten Semarang dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan.
15. Angka harapan hidup di Kabupaten Semarang Tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan yang signifikan.
16. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya.
17. Tahun 2020 inflasi di Kabupaten Semarang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat menurun sehingga daya beli juga menurun.
18. Ketimpangan pendapatan perkapita di Kabupaten Semarang selama lima tahun belakangan ini mengalami peningkatan.
19. Yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Semarang adalah Industri Pengolahan, Jasa Perusahaan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.
20. Adapun sektor potensial di Kabupaten Semarang. diantaranya: sector Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; sector Jasa Keuangan dan Asuransi; sektor Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, dan Real Estate.

21. Sedangkan sektor terbelakang di Kabupaten Semarang adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

5.2 Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, maka kajian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menjaga kestabilan harga-harga di pasar agar dapat tetap mempertahankan daya beli masyarakat. Hal ini bertujuan agar perekonomian di Kabupaten Semarang tetap tumbuh di tengah situasi perekonomian global yang tidak pasti akibat pandemi Covid-19.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang harus terus meningkatkan pelayanan dan menjaga iklim Investasi di Kabupaten Semarang tetap kondusif. karena investasi menjadi salah satu faktor penting

di dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Semarang, khususnya mengurangi angka pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja, sehingga ketika masyarakat sudah tidak menganggur lagi ketimpangan distribusi pendapatan pun akan ikut berkurang.

3. Perlunya strategi pembangunan di Kabupaten Semarang khususnya untuk sektor industri pengolahan karena sektor ini masih menjadi sektor tumpuan perekonomian di Kabupaten Semarang.
4. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang untuk mengukur seberapa berkualitaskah pertumbuhan ekonomi yang tercipta, karena dasar pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan pengurangan pengangguran, kemiskinan serta menurunnya ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022).
Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka . Jawa Tengah:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Semarang, B. P. (2020). *Kabupaten Semarang Dalam Angka
2022*. Kabupaten Semarang.
- Tengah, B. P. (2020). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka
2022*. Provinsi Jawa Tengah.